

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulah, H dan H. Salim. 2007. *Perancang Kontrak dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refina Aditama.
- _____. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- _____. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib dan Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Adnan, Muhamad. 1985. *Asal Usul Dan Sejarah Akta Notarial*. Bandung: Sinar Baru.
- Anand, Ghansam. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anggraini, Jum. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Lubis, Suhrawadi K. 1994. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahja, Djuhad. 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Jakarta: Durat Bahagia.
- Mamudji, Sri dan Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan Pertama, edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Mezak, Meray Hendrik. 2006. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*. Karawaci: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Naja, Daeng. 2012. *Teknik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Nugraha, Agri Fermentia. 2013. *Pertanggungjawaban Notaris yang Berhenti dengan Hormat (Setelah Berumur 65 Tahun) Terhadap Akta yang Dibuat (Analisis Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), (Naskah Publikasi Jurnal. Program Studi Magister Kenotariatan*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Silalahi, Ulber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*. Bandung: Bina Budhaya.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soerodjo, Irwan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supranto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Thamrin, Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-3. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Untung, H. Budi. 2002. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

B. Peraturan Perundangan

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Jakarta.

Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02. PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pengawas*.

Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris*.

Republik Indonesia. 2004. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. *Perubahan Kode Etik Notaris, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015*. Jakarta.

C. Internet

Inilahcom, “Yasonna: Pengawasan Notaris Perlu Diperketat”, 17 September 2019, <<https://inilah.com/news/2545966/yasonna-pengawasan-notaris-perlu-diperketat>> [diakses pada 27 Februari 2020, pukul 23.00]

